

1. Masih belum optimalnya partisipasi masyarakat sebagai peserta Keluarga Berencana;
2. Masih terbatasnya tenaga penyuluh Keluarga Berencana;
3. Masih belum optimalnya cakupan peserta KB aktif;
4. Masih besarnya rata-rata jumlah anak per keluarga;
5. Rendahnya partisipasi perempuan di legislative dan pemerintahan;
6. Rendahnya komitmen terhadap Kota Layak Anak;
7. Belum memadainya kapasitas SDM untuk melaksanakan PUG;
8. Ketersediaan data terpilah Gender masih minim, sehingga belum digunakan dalam mendukung perencanaan pembangunan.

### **3.3 Telaahan Renstra Kementerian/Lembaga Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Renstra Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional.**

#### **3.3.1 Renstra Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.**

Permasalahan pembangunan pemberdayaan perempuan, **Disparitas Indeks Pembangunan Gender (IPG)** antar wilayah menunjukkan bahwa IPG antar wilayah di Indonesia masih sangat bervariasi, meskipun hampir setiap tahunnya IPG masing-masing provinsi mengalami kenaikan.

Di wilayah Sumatera, peringkat IPG tertinggi adalah Provinsi Sumatera Utara sebesar 68,91, diikuti oleh Sumatera Barat sebesar 67,74 dan Bengkulu sebesar 67,34. Sedangkan nilai IPG di tujuh provinsi lainnya masih di bawah rata-rata nasional sebesar 66,77.

#### **I. Visi**

Visi Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 2010-2014 dirumuskan sebagai berikut :

**“ Terwujudnya Kesetaraan Gender dan Terpenuhinya Hak Anak”**

#### **II. Misi**

Untuk mewujudkan visi tersebut di atas, ditetapkan misi Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, yaitu :

**“ Meningkatkan Kesejahteraan dan Kualitas Hidup Perempuan dan Anak”**

Misi merupakan langkah utama sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak untuk mencapai visi terwujudnya kesetaraan gender dan terpenuhinya hak anak. Kementerian